

BERITA PERS

Dapat diterbitkan segera

Perlindungan Sosial Indonesia Ke Depan: Perlindungan Sepanjang Hayat Bagi Semua

JAKARTA. 3 Oktober 2019. Perwakilan Lembaga Penelitian/*Think-Tank*, Akademisi, Praktisi, Organisasi Non-Pemerintah dan Swasta berkumpul di Hotel Morrissey, Jakarta, hari ini 3 Oktober 2019 untuk membahas sistem perlindungan sosial Indonesia saat ini dan ke depan. Diharapkan ke depan perlindungan sosial dapat memberikan perlindungan sepanjang hayat bagi semua warga negara sesuai amanat konstitusi.

Masyarakat Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan dan risiko di sepanjang hayat mereka, mulai dari kandungan hingga akhir hayat yang menyebabkan kesejahteraannya mengalami goncangan dan sangat dinamis, terutama jika sistem perlindungan sosial yang komprehensif masih terbatas.

Perlindungan Sosial, baik melalui skema nonkontribusi/bantuan sosial maupun skema kontribusi/jaminan sosial adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani risiko dan tantangan sepanjang hayat (siklus hidup) dari guncangan dan kerentanan sosial yang dihadapi semua warga negara.

Walaupun Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan sistem perlindungan sosial dan telah meningkatkan investasi pada bantuan sosial, berbagai tantangan juga masih ditemukan. Program-program skema nonkontribusi yang ada baru menjangkau masyarakat yang miskin dan rentan dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari kelompok tersebut. Program-program tersebut belum secara komprehensif mengatasi kerentanan yang dialami oleh sebagian besar warga negara. Mayoritas penduduk pada kelompok menengah berkembang, atau disebut dengan "*missing middle*" masih sangat rentan terhadap risiko dan guncangan karena belum mendapatkan manfaat yang memadai dari sistem perlindungan sosial yang ada.

Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Sekretariat TNP2K, Elan Satriawan mengutarakan bahwa sudah banyak upaya pemerintah untuk mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyempurnaan sistem perlindungan sosial. "Pengembangan dan perbaikan secara signifikan telah dilakukan untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih baik untuk semua, seperti penyempurnaan ketepatan sasaran program yang terus dilakukan, serta perbaikan mekanisme penyaluran bantuan."

"Namun demikian, hasil analisis Sekretariat TNP2K menunjukkan masih banyak kelompok rentan yang belum memiliki akses ke program-program perlindungan sosial. Misanya, hanya sekitar 12% kelompok lansia saat ini yang telah memiliki perlindungan sosial di masa tuanya sementara itu baru sekitar 23 persen total populasi usia kerja yang telah memiliki jaminan pensiun dan menjadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan; sebagian besar peserta merupakan pekerja Penerima Upah (PU) yang biasanya bekerja di sektor formal. Banyak

pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang bekerja di sektor informal tidak memiliki perlindungan sosial”, lanjut Elan.

Idealnya, sistem perlindungan sosial mencakup seluruh warga negara termasuk masyarakat berpendapatan menengah (terutama kelompok “*missing middle*”) dan kelompok lansia yang selama ini telah berkontribusi pada negara melalui sumbangan tenaga kerja, produksi, usaha ekonomi, dan pembayaran pajak -termasuk pajak pembelian, selain berpotensi menjadi bagian terbesar dari populasi pemilih. Oleh karena itu, manfaat program perlindungan sosial bagi kelompok ini harus dilihat sebagai upaya 'memberikan manfaat sebagai pengembalian sebagian kecil kontribusi yang pernah diberikan kepada negara selama ini' sehingga dapat terus berinvestasi pada negara. Dengan demikian, komitmen sosial antar pemerintah dan warga negaranya terus terbangun dengan baik.

Dalam upaya untuk terus berkontribusi memperbaiki Sistem Perlindungan Sosial, TNP2K telah melakukan analisis terhadap sistem dan *gap* perlindungan sosial dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi dan demografi Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut, TNP2K mengusulkan penataan sistem perlindungan sosial ke depan yang dituangkan dalam Buku “Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Ke Depan: Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat Bagi Semua” yang diterbitkan pada November 2018. Buku tersebut disusun sebagai rekomendasi dalam rangka membangun, menyempurnakan dan mengembangkan Sistem Perlindungan Sosial Indonesia ke depan yang komprehensif yang menjangkau seluruh kelompok usia, mulai dari usia anak, usia sekolah, usia kerja, usia lanjut, dan penyandang disabilitas.

“Hasil kajian Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi ditemukan pada kelompok lansia dan kelompok anak. Oleh karena itu arah Sistem Perlindungan Sosial Indonesia ke depan harus dapat melindungi anak-anak melalui Bantuan/Tunjangan Anak yang inklusif dan memastikan perlindungan sosial bagi kelompok lansia, termasuk memberikan Bantuan/Tunjangan Lansia selain membangun Sistem Jaminan Sosial yang dapat memberikan manfaat bagi kelompok usia produktif baik yang berada di sektor formal maupun informal, serta memastikan tersedianya perlindungan bagi penyandang disabilitas di seluruh kelompok usia”, Elan menegaskan.

Data yang ada juga menunjukkan saat ini jumlah populasi penduduk kelompok usia kerja/produktif (usia 19-59 tahun) adalah lebih dari 150 juta penduduk (sekitar 57 persen dari total populasi).¹ Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarief, menyampaikan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini telah melindungi 52,5 juta tenaga kerja, Itupun didominasi oleh tenaga kerja di sektor formal. “Perlu ada inovasi kebijakan yang agresif untuk memperluas perlindungan kepada tenaga kerja di Indonesia. Langkah strategis di tahap awal adalah kebijakan pemerintah untuk memperluas penerima bantuan iuran kepada tenaga kerja yang masuk kategori miskin dan rentan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)”, jelasnya. Memasuki 5 tahun implementasi SJSN di BPJS Ketenagakerjaan, Krishna memandang perlu ada inovasi manfaat yang bersifat layanan (*In-Kind Benefit*) diluar santunan – santunan (*In-Cash Benefit*) yang sudah ada di 4 program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, agar perlindungan jaminan sosial dapat lebih luas dinikmati oleh pekerja bukan hanya di masa usia produktif saja tetapi juga melindungi pekerja dan keluarganya di sepanjang hayatnya.

¹ Susenas 2018

Direktur the SMERU Research Institute, Widjajanti Isdijoso juga mengutarakan pendapat yang senada, “Idealnya, sistem perlindungan sosial harus bisa diakses dan dirasakan oleh seluruh penduduk termasuk masyarakat berpendapatan menengah berkembang agar dapat menghadapi tantangan-tantangan hidup sepanjang hayat sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sejauh ini, perlindungan sosial terkait tenaga kerja masih berfokus kepada mereka yang berada di sektor formal. Perlu ada usaha khusus dari pemerintah dan pengelola perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat yang berada di sektor informal, khususnya yang tinggal di wilayah rural dan yang tingkat pendidikannya rendah”, ungkap Widjajanti.

Berdasarkan pengalaman dari negara-negara berpendapatan menengah yang telah memiliki sistem perlindungan sosial yang komprehensif, Indonesia akan mendapatkan manfaat yang lebih besar kedepannya, jika meningkatkan investasi pada sistem perlindungan sosial. Penyempurnaan sistem perlindungan sosial ke depan tidak hanya akan berkontribusi pada upaya penurunan kemiskinan, namun juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kohesi sosial di masyarakat.

Diskusi yang berlangsung selama setengah hari ini diselenggarakan atas kerjasama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim BPJS Ketenagakerjaan melalui seri seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) yang diselenggarakan The SMERU Research Institute. Kegiatan diskusi ini diharapkan dapat memberikan dukungan untuk sistem perlindungan sosial yang lebih baik bagi semua dimasa depan.

-selesai-

Tentang The SMERU Research Institute

SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. SMERU juga berpengalaman dalam menjalankan penelitian kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk penelitian tentang ketakhadiran guru yang hasilnya telah menjadi salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di www.smeru.or.id.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Ratri Indah Septiana
Kepala Bidang Komunikasi
The SMERU Research Institute
rseptiana@smeru.or.id
08161361514

Materi presentasi para pembicara dapat diunduh di <http://smeru.or.id/id/smeru-fkp-3okt2019>